

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Diskominfo Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang serta usulan dari berbagai pihak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima kasih.

Barabai, 21 Pebruari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM**  
NIP. 19840711 200312 2 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penyusunan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. ....	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	23
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	33
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	34
C. Program dan Kegiatan .....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	39
BAB V PENUTUP.....	49

## **BAB.I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat menyusun dokumen perencanaan untuk periode satu tahun ke depan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan misi dan visi Bupati dituangkan melalui program-program kegiatan setiap tahun anggaran melalui penjangkaran aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk singkronisasi sasaran, Isu Strategis, arah kebijakan, yang dituangkan dalam PPAS, KUA di Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan direalisasikan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Agar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan program kegiatan berjalan lancar serta memenuhi target pencapaian sasaran diperlukan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan. Untuk itulah dibuat Rencana Kerja (Renja) skpd Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023.

Secara umum Rencana Kerja Tahun 2023 memuat kebijakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan kegiatan pendukungnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Uraian Renja Tahun 2023 ini juga menggambarkan secara singkat Pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang dihadapi serta Prediksi Tujuan, Sasaran Program Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan isu-isu strategis, arah kebijakan serta rumusan-rumusan prioritas pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada kebijakan baik tingkat pusat, provinsi, dan penjabaran visi misi bupati terpilih periode 2021 - 2026

Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
- b. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan.

- c. Merupakan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 514);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah tahun 2021-2026

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### 1. Maksud

Maksud dari penulisan ini adalah :

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Untuk menuangkan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja.

#### 2. Tujuan

- a. Tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten
- b. Tercapainya visi dan misi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB. I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB    II      HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB    III     TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAB V PENUTUP**

## **BAB. II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 dapat di lihat pada tabel II.1 di bawah.

Dalam tabel tersebut dapat tergambar bahwa :

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik  
Tahun 2021 tercapai 50 indek dari target 50 indek, sedangkan untuk tahun 2022 diharapkan tercapai taget 60 indek
- b. Program Aplikasi Informatika  
Tahun 2021 tercapai 38% dari target 38%, sedangkan untuk tahun 2022 diharapkan tercapai taget 48%
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Tahun 2021 tercapai 100% dari target 100%, sedangkan untuk tahun 2022 diharapkan tercapai taget 100%
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  
Tahun 2021 tercapai 5,6% dari target 5,6%, sedangkan untuk tahun 2022 diharapkan tercapai taget 8,3%



**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Progra m (Renstr a Perangk at Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiat an s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n- 2)/2021			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah Tahun 2022/n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catat an
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021(n- 2)	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+ 9)*	11	12

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A</b>	<b>Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	4	4	4	100%	4	12	50%	
2.16.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	3	3	3	100%	3	9	50%	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	17	16	16	100%	18	18	82%	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.02 .01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	2	2	2	100%	2	6	50%	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	100	0	0	0	0%	18	18	18%	
2.16.01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22	17	16	16	100%	18	18	81.82 %	
2.16.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	117	17	16	16	100%	18	51	43.59 %	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

		Pegawai									
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	8	8	100%	8	8	100%	
2.16.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100%	5	5	100%	
2.16.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	5	5	100%	5	5	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9504	1584	1584	1584	100%	1584	4752	50%	
2.16.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2172	150	168	168	100%	300	618	28.45 %	
2.16.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	18	18	18	100%	19	55	44.72 %	
2.16.01.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	0	0	0	0%	2	2	20%	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	80%	50%	50%	50%	100%	60%	60%	75%	
2.16.01.2.07 .9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	0	0	0	0%	0	0	0%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

		Disediakan									
2.16.01.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0	0	0	0%	2	2	20%	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	100%	2	2	100%	
2.16.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3	3	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100%	4	4	100%	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	6	6	100%	6	6	100%	
2.16.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	16	16	100%	16	16	100%	
2.16.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	3	3	100%	3	3	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)</b>	<b>80</b>	40	50	50	100%	60	60	75%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat	90%	0	60%	60%	100%	70%	70%	78%	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	350	0	0	0	0%	50	50	14.29 %	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	270	0	20	20	100%	30	50	18.52 %	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	18	3	3	3	100%	3	9	50%	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6	6	6	6	100%	6	6	100%	



**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.02.2.01 .07	Layanan Hubungan Media	Jenis Layanan Hubungan Media	4	4	4	4	100%	4	4	100%	
2.16.02.2.01 .08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	1	2	1	50%	2	2	50%	
2.16.02.2.01 .10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	37	0	10	0	0%	15	15	40.54 %	
2.16.02.2.01 .13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	0	0	4	0%	4	8	66.67 %	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Presentase Aplikasi yang terintegrasi</b>	<b>88%</b>	38%	38%	38%	100%	48%	48%	55%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	100%	24%	35%	35%	100%	46%	46%	46%	
2.16.03.2.01 .02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37	9	13	15	115%	17	17	46%	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.03.2.02 .01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37	37	37	37	100%	37	37	100%	
2.16.03.2.02 .03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
2.16.03.2.02 .04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	37	34	34	34	100%	34	34	92%	
2.16.03.2.02 .07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	37	37	37	37	100%	37	37	100%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.16.03.2.02 .10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	2	3	0	0%	4	4	50%	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data sektoral yang terbaru</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan dan variabel statistik sektoral	<b>100%</b>	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.20.02.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	1	2	2	100%	2	2	17%	

**Bab. II**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.20.02.2.01 .02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	20	0	0	0	0%	16	16	80%	
2.20.02.2.01 .03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20	14	15	15	100%	16	16	80%	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi</b>	<b>19.4%</b>	5.6%	5.6%	5.6%	100%	8.3%	8.3%	43%	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	<b>67%</b>	0%	6%	6%	100%	11%	11%	16%	

2.21.02.2.01 .03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24	1	4	4	100%	8	8	33%	
---------------------	--	---	----	---	---	---	------	---	---	-----	--

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, yaitu : **“Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”** secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
- b. Meningkatnya penerapan e-Government

Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan, dengan sasaran :

Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Tujuan 4 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

Adapun pencapaian kinerja secara keseluruhan tahun sebelumnya dan proyeksi kinerja tahun berjalan Dinas komunikasi dan informatika tergambar dalam tabel II.2 dibawah ini :

**Tabel II.2****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	-	-	50	60	65	70	50	60	65	70	
2	Presentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat	-	-	60%	70%	75%	80%	60%	70%	75%	80%	
3	Persentase data sektoral yang terbaharui	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase kelengkapan data sektoral	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	-	-	38%	48%	58%	68%	38%	48%	58%	68%	
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	-	-	35%	46%	57%	68%	35%	46%	57%	68%	



7	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
8	Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi	-	-	5.6%	8.3%	11.1 %	13.9 %	6%	8%	11.1 %	13.9 %	
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	-	-	6%	11%	25%	39%	6%	11%	25%	39%	
10	Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
11	Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
12	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
13	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
14	Persentase Pegawai PD	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	

	yang dilayani											
15	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
16	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-	-	55%	60%	65%	70%	55%	60%	65%	70%	
17	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	
18	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara kuantitatif menunjukkan angka yang cukup baik. Walaupun demikian secara kualitatif masih harus dilakukan pencermatan penilaian yang cukup mendalam. Hal ini perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan jawaban terhadap perkembangan informasi yang ada saat ini.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tergambar dalam Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistic di Kab. HST
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST

3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK, Komunikasi dan Informasi Publik
4. Peningkatan pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan bisnis.
5. Mewujudkan masyarakat cerdas digital.
6. Reformasi Birokrasi Diskominfo

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satunya bidang ekonomi ditekan pada pengembangan sentra pertanian, perikanan, pariwisata, IKM/UMKM potensial.

Untuk mendukung sasaran pembangunan tersebut salah satunya diperlukan peningkatan infrastruktur TIK berupa pemenuhan akses internet maupun seluler yang juga menjadi salah satu target kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Analisis kebutuhan Perangkat Daerah untuk mendukung hal tersebut, seperti tertera dalam tabel II.4 di bawah ini

**Tabel II.4**  
Rumusan kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023  
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	HST	<b>Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>3,372,996,630</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	43,484,650	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	28,949,250	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	14,535,400	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	2,568,867,460	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ASN	2,568,867,460	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	6,600,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	6,600,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	17,100,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	19 paket	7,600,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19 Dokumen	4,750,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	4,750,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	285,545,720	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	3,886,960	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	37,432,560	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	16,098,200	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1584 dok	7,128,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	360 Laporan	18,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	200,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	45,100,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 buah	603,750,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	45,100,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	286,597,900	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6,037,900	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	60,000,000	

		yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	220,560,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	119,700,900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	76,748,100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	10,067,200	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	32,885,600	
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)</b>	<b>65</b>	<b>2,314,630,690</b>	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat	75%	2,314,630,690	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 dokumen	376,255,000	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	40 dokumen	21,366,800	

Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 dokumen	135,750,890	
Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 dokumen	1,103,509,000	
Layanan Hubungan Media		Jenis Layanan Hubungan Media	4 jenis	381,749,000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 Dokumen	11,000,000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 orang	60,000,000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 jenis	225,000,000	
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Presentase Aplikasi yang terintegrasi</b>	<b>58%</b>	<b>4,676,932,213</b>	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	57%	5,500,000	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	5,500,000	
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	100%	4,671,432,213	

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	494,487,057	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	505,000,000	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	35 Dokumen	3,171,522,556	Mendukung pemenuhan infrastruktur digital dalam rangka pengembangan sentra pertanian, perikanan, pariwisata, IKM/UMKM potensial
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	30 aplikasi	304,980,600	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 dokumen	195,442,000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase data sektoral yang terbaharui</b>	<b>100%</b>	<b>45,940,000</b>	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelengkapan metadata kegiatan dan variabel statistik sektoral	<b>100%</b>	45,940,000	



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	45,940,000	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	17 orang	12,047,750	
Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	17 metadata	46,251,000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi</b>	<b>11,1%</b>	<b>187,243,200</b>	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<b>25%</b>	187,243,200	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	187,243,200	
<b>TOTAL</b>				<b>10,597,742,733</b>	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyeleraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang SKPD Kabupaten dan Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program dan Kegiatan oleh para pemangku kepentingan tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah :

**Tabel II.5****Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nateh (BTS)	-	-	usulan diteruskan ke kementerian Kominfo (BAKTI) melalui aplikasi PASTI
2	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tabat (Menara Pos Pokmaswas)	-	-	disampaikan ke dinas terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)
3	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Datar Batung (Akses Jaringan Seluler dan Internet)	-	-	usulan diteruskan ke kementerian Kominfo (BAKTI) melalui aplikasi PASTI
4	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tandilang (Jaringan Seluler dan Internet)	-	-	usulan diteruskan ke kementerian Kominfo (BAKTI) melalui aplikasi PASTI

5	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hinas Kiri (Jaringan Sinyal Seluler dan Internet)	-	-	usulan diteruskan ke kementerian Kominfo (BAKTI) melalui aplikasi PASTI
6	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hawang (akses informasi (internet))	-	-	usulan diteruskan ke kementerian Kominfo (BAKTI) melalui aplikasi PASTI

**BAB. III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Identifikasi Kebijakan Nasional dan provinsi untuk tahun 2023 seperti dalam taebI III.1 di bawah ini :

**Tabel III.1**  
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Akselerasi Reformasi Birokrasi Melalui Transformasi Digital	Instruksi Presiden tentang Percepat Transformasi Digital,	5 Langkah Percepat Transformasi Digital 1. Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet 2. Roadmap Transformasi Digital di sektor-sektor Strategis (Pemerintahan, Layanan Publik, Bantuan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Industri, maupun Penyiaran) 3. Integrasi Pusat Data Nasional 4. SDM Talenta Digital 5. Regulasi, Skema Pendanaan dan Pembiayaan
B	Provinsi		
1	Target Capaian Kinerja Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan	Renja Diskominfo Prov Kalsel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : 3,2 2. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap dan Akurat : 85% 3. Rata-rata Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : 290 4. Persentase Wilayah Bebas Blankspot : 93%

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel dibawah ini menggambarkan Tujuan, Sasaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2023

**Tabel III. 2**  
Tujuan dan Indikator Tujuan disertai Target Tahun 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023
1	2	3	4
1	Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPBE	2,90
2	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Persentase PD memanfaatkan data untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan	100%
3	Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	indeks KAMI	314
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Indek RB Diskominfo	32,5

Sasaran dan Indikator Sasaran disertai Target Tahun 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah	74

2	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	58%
3	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	40%
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keaamanan informasi yang tertangani	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakip Diskominfo	78

## Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

## Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
		Meningkatnya penerapan e-Government
2	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3	Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 tergambar dalam tabel III.3 di bawah ini

:

**Tabel III.3**

<b>Kode</b>	<b>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan</b>
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik



2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
-----------------	--

**BAB. IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel. IV**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

**Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10,597,742,733				10,980,322,126
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10,364,559,533				10,734,759,391
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar	HST	100%	3,372,996,630	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	3,446,120,927
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &		100%	43,484,650			100%	47,833,115

		evaluasi tepat waktu						
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	28,949,250		4 dokumen	31,844,175
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dokumen	14,535,400		3 dokumen	15,988,940
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	2,568,867,460			2,581,367,460
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 ASN	2,568,867,460		20 ASN	2,581,367,460
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	6,600,000		100%	7,260,000
2.16.01.2.02.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Dokumen	6,600,000		2 Dokumen	7,260,000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100%	17,100,000		100%	18,000,000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		19 paket	7,600,000		20 paket	8,000,000
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		19 Dokumen	4,750,000		20 Dokumen	5,000,000

		Kepegawaian							
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		19 Dokumen	4,750,000			20 Dokumen	5,000,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100%	285,545,720			100%	303,177,672
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 paket	3,886,960			8 paket	4,275,656
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 paket	37,432,560			5 paket	41,175,816
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	16,098,200			5 paket	16,098,200
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1584 dok	7,128,000			1584 dok	7,128,000
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		360 Laporan	18,000,000			420 Laporan	21,000,000

Bab. IV  
Rencana Kerja dan Pendanaan

2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	200,000,000			21 Laporan	210,000,000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	3,000,000			2 Dokumen	3,500,000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100%	45,100,000			100%	49,610,000
2.16.01.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 buah	603,750,000		konsultan perenc. gedung kantor	1 buah	5,531,395,000
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	45,100,000			2 unit	49,610,000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	286,597,900			100%	307,201,690
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	6,037,900			2 Laporan	6,641,690
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	60,000,000			3 Laporan	75,000,000

2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	220,560,000			4 Laporan	225,560,000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100%	119,700,900			100%	131,670,990
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 unit	76,748,100			6 unit	84,422,910
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16 unit	10,067,200			16 unit	11,073,920
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	32,885,600			3 unit	36,174,160
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)</b>	<b>HST</b>	<b>65</b>	<b>2,314,630,690</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>70</b>	<b>2,524,707,546</b>
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat		75%	2,314,630,690			80%	2,524,707,546

Bab. IV  
Rencana Kerja dan Pendanaan

2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		60 dokumen	376,255,000			70 dokumen	438,964,167
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		40 dokumen	21,366,800			50 dokumen	26,708,500
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		3 dokumen	135,750,890			3 dokumen	149,325,979
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		6 dokumen	1,103,509,000			6 dokumen	1,213,859,900
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jenis Layanan Hubungan Media		4 jenis	381,749,000			4 jenis	391,749,000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		3 Dokumen	11,000,000			3 Dokumen	12,100,000
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		20 orang	60,000,000			25 orang	64,000,000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4 jenis	225,000,000			4 jenis	228,000,000



<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Presentase Aplikasi yang terintegrasi</b>	<b>HST</b>	<b>58%</b>	<b>4,676,932,213</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>68%</b>	<b>4,763,930,918</b>
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi		57%	5,500,000			68%	6,050,000
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		21 Dokumen	5,500,000			25 Dokumen	6,050,000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi		100%	4,671,432,213			100%	4,757,880,918
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		37 Dokumen	494,487,057			37 Dokumen	543,935,762
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 unit	505,000,000			1 unit	525,000,000

2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		35 Dokumen	3,171,522,556			35 Dokumen	3,181,522,556
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		30 aplikasi	304,980,600			30 aplikasi	308,980,600
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		5 dokumen	195,442,000			6 dokumen	198,442,000
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>45,940,000</b>				<b>48,319,535</b>
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data sektoral yang terbaharui</b>	<b>HST</b>	<b>100%</b>	<b>45,940,000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>48,319,535</b>
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan dan variabel statistik sektoral		<b>100%</b>	45,940,000			<b>100%</b>	48,319,535

2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		4 Dokumen	45,940,000			4 Dokumen	48,319,535
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		17 orang	12,047,750			18 orang	13,252,525
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		17 metadata	46,251,000			18 metadata	47,251,000
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>187,243,200</b>				<b>197,243,200</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi</b>	<b>HST</b>	<b>11,1%</b>	<b>187,243,200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>13,9%</b>	<b>197,243,200</b>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD		<b>25%</b>	187,243,200			<b>39%</b>	197,243,200

Bab. IV  
Rencana Kerja dan Pendanaan

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	HST	12 Laporan	187,243,200			16 Laporan	197,243,200
<b>TOTAL</b>					<b>10,597,742,733</b>				<b>10,980,322,126</b>

**BAB. V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022 ini masih merupakan draf awal renja, sehingga perbaikan di sana sini masih sangat diperlukan.

Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat tergantung kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi/konsultasi yang lebih baik akan mampu mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan informatika dalam mendukung visi, misi Pimpinan Daerah.

Barabai, 8 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM**  
NIP. 19840711 200312 2 001